

### BAB III

#### PANDANGAN MOHAMMAD HATTA TENTANG DEMOKRASI BARAT

##### A. Awal Mula Lahirnya Demokrasi

Demokrasi pertama kali berkembang di negara-kota Yunani Kuno lebih kurang tahun 500 SM dan berlangsung sekitar 200 tahun. Istilah “Demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang tepatnya di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Demokrasi punya arti kata rakyat yang berkuasa atau istilah lainnya berasal kata Yunanai “*Demos*” berarti rakyat, “*Kratos/kratein*” yang berarti kekuasaan/berkuasa. Dalam karya klasik Yunani yang berjudul *Polis*, demokrasi mengacu pada konstitusi (sistem pemerintahan) tempat rakyat yang lebih miskin lebih bisa menggunakan kekuasaan untuk membela kepentingan mereka yang sering kali berbeda dengan kepentingan orang kaya dan orang bangsawan.

Dalam implementasinya di Yunani, demokrasi dalam pengertian sistem pengambilan suara dilakukan secara langsung sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah gagasan tersendiri dalam bidang ilmu politik. Pembagian kekuasaan dalam suatu negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip *Trias Politica*<sup>1</sup> dimana demokrasi menempati posisi vitalnya. Dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat

---

<sup>1</sup> Konsep *Trias Politica* yaitu membagi ketiga kekuasaan politik negara menjadi eksekutif, yudikatif dan legislatif untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Miariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008, hlm. 111.

juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam *Trias Politica* ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Sistem demokrasi yang terdapat di negara-kota Yunani Kuno merupakan sebuah sistem demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh semua warga negara. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat dilaksanakan secara efektif karena dalam penyelenggaraannya berlansung dengan kondisi yang sederhana, karena wilayahnya terbatas dan jumlah penduduknya sedikit. Lagi pula, ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya bagian kecil dari penduduk. Dalam negara moderen demokrasi tidak lagi bersifat langsung, melainkan demokrasi berdasarkan perwakilan. Gagasan demokrasi Yunani sudah mulai hilang dari dunia Barat waktu bangsa romawi, yang sedikit banyak masih mengenal kebudayaan Yunani, karena sudah tersaingi oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400).<sup>2</sup>

Masyarakat Abad Pertengahan dicirikan oleh struktur yang feodal yang kehidupan sosial serta spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu *Magna Carta* (Piagam Besar) tahun 1215. Piagam *Magna Carta* merupakan semi kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris di mana untuk pertama kali seorang raja yang berkuasa mengikatkan diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan *privileges* dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Walaupun piagam ini lahir dalam suasana feodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, namun dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi.

Sebelum abad pertengahan berakhir, pada permulaan abad 16 di Eropa Barat muncul negara-negara nasional dalam bentuk yang modern. Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern di mana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasannya. Dua kejadian ini adalah *Renaissance*<sup>3</sup> dan *Reformasi*,<sup>4</sup> Kedua aliran ini mempersiapkan Eropa Barat untuk menyelami masa Abad pemikiran beserta Rasionalisme, suatu aliran pemikiran yang ingin

---

<sup>3</sup> *Renaissance* adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang selama abad pertengahan telah disihkan. Aliran ini membelokkan perhatian yang tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan ke arah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan baru. Aliran ini berpengaruh di negara-negara Eropa Selatan seperti Itali. *Ibid.*, hlm. 110.

<sup>4</sup> Reformasi merupakan suatu gerakan perubahan untuk melepaskan diri dari kekuatan penguasa gereja, dogma maupun kekuatan sosial dan politik. Hasil dari pergumulan ini ialah timbulnya gagasan mengenai perlunya ada kebebasan beragama serta ada garis pemisah yang tegas antara soal-soal agama dan soal-soal keduniawian, khususnya di bidang pemerintahan. Aliran ini berpengaruh di negara-negara Eropa Utara seperti di Jerman dan Swiss. *Ibid.*

memerdekaan pikiran manusia dari batas-batas yang ditentukan oleh gereja dan mendasarkan pemikiran atas akal (*ratio*) semata-mata. Kebebasan berpikir membuka jalan untuk meluaskan gagasan ini di bidang politik. Timbulah gagasan dimana manusia mempunyai hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja dan mengakibatkan dilontarkannya kecaman-kecaman terhadap raja, yang menurut pola yang sudah lazim pada masa itu mempunyai kekuasaan tak terbatas.<sup>5</sup>

## **B. Perkembangan Demorasi Klasik**

Demokrasi klasik pertama kali muncul pada abad ke-5 SM tepatnya di Yunani. Dalam sejarah Yunani, suatu tatanan demokrasi diawali dengan adanya aspirasi rakyat yang disalurkan secara langsung, yaitu suatu pemerintahan dimana rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahannya tanpa melalui perwakilan. Hal ini sangat dimungkinkan dalam suatu negara kota (*city state*) dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, sebagai contoh yaitu yang terjadi di kota Athena, di mana rakyat menyalurkan kehendak dan aspirasinya, dan pemerintahan menaggapinya secara langsung.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, dikenal dengan nama demokrasi langsung, dalam arti rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas berbagai permasalahan kenegaraan. Bentuk negara demokrasi klasik lahir dari pemikiran aliran yang dikenal berpandangan *a tree partite classification of state* yang membedakan bentuk negara atas bentuk ideal yang dikenal sebagai

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>6</sup> Miariam Budiardjo, *Ibid.*, hlm. 108-109.

bentuk negara klasik. Para penganut aliran ini adalah Plato, Aristoteles, Polybius dan Thomas Aquino.<sup>7</sup>

a) Plato

Plato adalah seorang filsuf Yunani klasik, mahasiswa Socrates, penulis dialog filosofis dan pendiri Academy di Athena, lembaga pendidikan tinggi pertama di dunia Barat. Seiring dengan mentornya, Socrates dan muridnya Aristoteles, Plato membantu meletakkan dasar-dasar filsafat dan sains Barat.<sup>8</sup> Plato adalah murid setia Socrates yang banyak mewarisi tradisi keilmuan dan filsafat gurunya, melalui Plato pemikiran-pemikiran Socrates<sup>9</sup> dilestarikan. Karena hasil pemikirannya tidak pernah ditulis dalam bentuk buku, kemudian Plato berinisiatif menulis semua pemikiran gurunya, melalui karya Plato yang fenomenal diantaranya; filsafat, logika, etika, retorika dan matematika.

Dengan adanya pemerintahan baru yang berkonsep "oligarkis-aristokrasi" telah berpengaruh terhadap psikologis bagi minat politik Plato. Tirani yang dikembangkan keluarga dekat Plato tidak berlangsung lama dan memberikan semangat politik baru bagi Plato. Pemulihan pemerintahan demokrasi pada awalnya membawa angin segar, tetapi akhirnya kandas ketika guru Plato yang

---

<sup>7</sup> <http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/>. Selasa, 11 Juni 2013.

<sup>8</sup> Mochtar Lubis, *Demokrasi: Klasik dan Modern*. Jakarta: Yayasan Obor, 2005, hlm. 15.

<sup>9</sup> Socrates dikenal taat beragama dan melihat sesuatu benar-benar secara obyektif. Socrates mengajak pemuda-pemuda untuk meyakini agama-agama mereka dengan metode dealektika. Inti ajarannya inilah yang menyebabkan Socrates ditangkap dan dihukum mati karena dianggap merusak kaum muda dengan ajaran kerohaniannya yang baru. Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum : Akal dan Hati sejak Thales sampai James*. Bandung: Rosdyakarya, 1990, hlm. 49.

bernama Socrates ditangkap dan dihukum mati oleh pemerintahan.<sup>10</sup> Kematian Socrates begitu mempengaruhi Plato termasuk karir politiknya. Kondisi politik saat itu bagi Plato sangatlah buruk. Tindakan penguasa yang memberikan hukuman mati bagi Socrates memberi anggapan bagi Plato berkaitan dengan sisi pribadi seorang penguasa yang gila kekuasaan dan akhirnya sangat berpengaruh pada karya-karyanya.

Nilai-nilai atau pandangan Plato pada dasarnya adalah pandangan tentang kebajikan sebagai dasar negara ideal. Ajaran Socrates kebajikan pengetahuan adalah diterima secara *taken for granted*. Menurut Plato negara ideal menganut prinsip yang mementingkan kebajikan. Apapun yang dilakukan atas nama negara harus dengan tujuan untuk mencapai kebajikan, atas dasar itulah kemudian Plato memandang perlunya kehidupan bernegara. Realitas politik yang ditemui dan dialami Plato telah memberikan dampak yang besar bagi perkembangan pemikirannya tentang bernegara. Demokrasi yang awalnya dianggap memberikan angin segar bagi kehidupan berpolitik ternyata dianggap tidak mampu menjawab berbagai persoalan bernegara saat itu.

Demokrasi yang disaksikan Plato sebagai konsep bernegara yang tidak memberikan jaminan konsep bernegara yang baik sebaliknya menjadi sanjungan dan diyakini sebagai konsep negara modern yang membawa perubahan besar bagi sebagian besar negara yang awalnya antara lain menganut sistem monarki absolut. Demokrasi sebagai konsep bernegara yang diyakini sangat baik tersebut pada dasarnya akan kembali seperti yang dialami Plato jika landasan-landasan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 50-51.

berdemokrasi tidak tertata baik dalam arti mencanangkan asas berdemokrasi dalam bernegara tanpa pencapaian demokrasi yang stabil pada akhirnya menjadi bumerang tersendiri serta mengundang traumatik politik pada masyarakat.

Konsep kebebasan yang diterima Plato adalah "kebebasan yang beradab" bukan "kebebasan di luar batas kebebasan" yakni kebebasan yang berkaitan dengan pengembangan diri. Jika pemikiran kebebasan Plato yang tidak menerima kebebasan yang sebebaskan-bebasnya disandingkan dengan konsep demokrasi yang stabil, maka keberadaan perangkat undang-undang sangat dibutuhkan sebagai upaya memperjelas wewenang dan otoritas penguasa sekaligus sebagai pedoman bagi warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>11</sup>

b) Aristoteles

Aristoteles lahir di Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Thracia, Yunani (dulunya termasuk wilayah Makedonia tengah) tahun 384 SM. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amyntas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato. Belakangan ia meningkat menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan akademi setelah Plato meninggal, dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Aristoteles meletakkan dasar pemikiran dalam demokrasi konstitusional. Tiga sumbangan Aristoteles yang tertanam di jantung pemikiran demokrasi, yaitu kebebasan pribadi, pemerintah berdasarkan undang-undang dasar, dan pentingnya kelas menengah yang besar.

---

<sup>11</sup> Mochtar Lubis, *op.cit.*, hlm. 1-10.

Landasan negara demokratis adalah kebebasan yang menurut orang pada umumnya, hanya dapat dinikmati dalam negara. Salah satu prinsip kebebasan ialah setiap orang secara bergantian wajib memerintah dan diperintah dan memang keadilan demokratis merupakan penerapan persamaan jumlah bukan proporsi dapat disebutkan bahwa, mayoritas harus memiliki kekuasaan tertinggi dan adapaun yang disetujui mayoritas harus menjadi tujuan yang adil bagi seluruh warga negara.

Ciri-ciri demokrasi adalah pemilihan para pejabat oleh semua diantara semua orang dan bahwa semuanya harus berkuasa atas masing-masing. Masyarakat yang paling baik itu dipimpin dari warga-warga kelas menengah, sebab penambahan kelas menengah membuat keseimbangan dan mencegah masing-masing ekstrim menjadi dominan. Keadaan serba di tengah bagi negara jelaslah paling baik, sebab tidak ada keadaan lain yang bebas dari perpecahan dan dimana kelas menengahnya besar di situ amat kecil kecenderungan timbul perpecahan dan pembrontakan.

Negara-negara demokrasi lebih aman dan lebih kuat dari pada oligarki, karena negara demokrasi itu mempunyai kelas menengah yang lebih banyak dan mempunyai bagian yang lebih besar dalam pemerintahannya, sebab kalau tanpa kelas menengah dan kaum miskin yang sangat besar akan meunculkan kekacauan dan negara itu segera berakhir. Bukti keunggulan kelas menengah ialah bahwa para pembuat undang-undang yang terbaik dari kelas menengah seperti Solon, yang dibuktikan dengan syair-syairnya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 11-15



c) Polybius

Polybius lahir sekitar 200 SM di Megalopolis, Arcadia, dimana pada saat itu adalah anggota aktif dari Liga Achaeen. Ayahnya, Lycortas adalah orang terkemuka pemilik tanah dan politisi. Akibatnya, Polybius mampu mengamati tangan pertama urusan politik dan militer Megalopolis. Pada 182 SM, ia diberi kehormatan ketika Polybios dipilih untuk membawa guci pemakaman Philopoemen, salah satu politisi Achaeen paling terkemuka dari generasinya. kurang lebih pada tahun 169 SM atau 170 SM, Polybius terpilih *Hipparchus*, atau pemimpin kavaleri. Awal karir politiknya sebagian besar dikhususkan untuk menjaga independensi Megalopolis. Polybios terkenal dengan teorinya yang disebut *Cyclus Theory*, yang sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari ajaran Aristoteles dengan sedikit perubahan, yaitu mengganti bentuk pemerintahan Politea dengan demokrasi.

Polybius adalah murid Aristoteles. ia menyatakan bahwa bentuk pemerintahan monarkhi, oligarkhi dan demokrasi berlangsung silih berganti berupa siklus, berputar dan pada gilirannya akan kembali ke asal. Teorinya ini dikenal dengan nama Siklus Polybius. Pembagian bentuk pemerintahan seperti dianut oleh Plato, Aristoteles dan Polybius itu pada masa modern dipelopori oleh Niccolo Machiavelli diganti menjadi monarkhi dan republik (berasal dari kata *res* yang berarti hal, benda, kepentingan dan *publica* yang berarti publik, umum, rakyat).

Sejalan dengan pendapat Aristoteles, Polybius berpendapat bahwa pemerintahan suatu negara umumnya diawali dengan bentuk kerajaan atau

monarki, dimana seorang raja/ratu yang memerintah sebagai penguasa tunggal demi kesejahteraan rakyatnya. Bentuk pemerintahan semacam ini lama-kelamaan merosot menjadi tirani ketika raja yang bersangkutan atau raja-raja keturunannya tidak lagi memikirkan kepentingan umum; melainkan, hanya mengajar kepentingannya sendiri dengan cara yang sewenang-wenang.

Menurut Polybius, dalam situasi semacam ini umumnya akan muncul sekelompok bangsawan yang kemudian menggerakkan perjuangan itu berhasil, negara akan diperintah oleh sekelompok bangsawan yang berupaya menyejahterakan semua rakyat. Inilah yang disebut pemerintahan Aristokrasi. Kekuasaan seperti itu cenderung untuk disalah gunakan, pemerintah kaum bangsawan yang baik itu (kaum Aristokrat) pun lama-kelamaan akan merosot menjadi pemerintahan yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi kaum bangsawan itu sendiri. Dengan demikian, pemerintahan aristokrasi berubah menjadi pemerintahan oligarki yang menindas rakyat.

Dari situasi semacam itu, rakyat akan memberontak dan menjalankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat maka disebut demokrasi. Lama-kelamaan negara ini akan jatuh ke keadaan di mana terjadi kekacauan, kebobrokan, dan korupsi akibat masing-masing rakyat juga mementingkan dirinya sendiri. Di tengah kekacauan seperti itu, Polybius meramalkan bahwa akan muncul seorang yang berani dan kuat untuk mengembalikan kehidupan negara ke keadaan yang tertib dan damai. Pemerintahan kembali dikendalikan oleh seorang yang berkuasa penuh, yaitu seorang raja atau monark (monarki).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Tafsir, *op.cit.*, hlm. 51.

d) Thomas Aquino

Thomas Aquinas merupakan seorang filsuf dan teolog yang dilahirkan di Lombardy, Italia sekitar tahun 1225. Aquinas lahir di masa kegelapan, dimana pada saat itu dikenal dengan masa kejayaan gereja, dan dari gereja satu-satunya pemerintahan yang sah dan tidak ada satu orang yang dapat dan boleh membantah apa yang telah ditetapkan oleh gereja.<sup>14</sup> Aquinas kelak menjadi pemikir yang paling berpengaruh dari Skolastik pada abad pertengahan. Selain seorang filsuf dan teolog, Aquinas juga dikenal sebagai penulis yang beberapa karyanya melegenda hingga saat ini.

Thomas Aquinas bukan seorang politikus. Ia adalah seorang filsuf dan lebih tepatnya lagi adalah seorang teolog. Untuk mengerti pandangan politis Thomas Aquinas, sebaiknya terlebih dahulu melihat pandangannya tentang kemasyarakatan dan tentang kekuasaan. Bagi Thomas Aquinas, kekuasaan dan negara mempunyai fungsi pertama-tama, sebagai yang melindungi dan memperjuangkan kepentingan umum (kesejahteraan umum). Sebuah peradaban, menurut Thomas Aquinas, akan tercapai kalau ada diskusi rasional yang membuat masyarakat secara sadar menerima apa yang baik. Kekuasaan seharusnya mendapat legitimasi dan tidak menjadi tirani. Menurut Thomas Aquinas kekuasaan yang dimiliki negara perlu adanya keseimbangan antara disiplin akal

---

<sup>14</sup> Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, Yogyakarta: Kanisius, 1989, cet. Ke-5, hlm. 104.

budi (*rasio*) dan keutamaan sebelum penggunaan kekuasaan itu bisa dikatakan salah atau benar.<sup>15</sup>

Thomas Aquinas memandang bentuk pemerintahan yang ideal harus memiliki dua kriteria, yaitu partisipasi semua masyarakat dan analisis akan semua rezim yang pernah ada seperti monarki, aristokrasi, dan demokrasi dengan melihat baik dan buruknya. Sekalipun dalam sistem Monarki masih ada tersimpan nilai lebihnya atau sisi baiknya, seperti yang sudah dikatakan Aristoteles, kalau pemimpin monarki tidak mempunyai keutamaan, akan jatuh menjadi tirani.<sup>16</sup>

### C. Perkembangan Demokrasi Moderen/ Barat

Setelah masa imperium Romawi yang otokratis, masa abad pertengahan yang teokratis, masa feodalisme dan monarki absolut, yang menjelaskan masa panjang sistem demokrasi kemudian kembali tumbuh dan berkembang subur di negara-negara Eropa Barat sejak pertengahan abad 19. Meskipun sejarah demokrasi sudah amat tua, beragam dan akan terus mengalami perkembangan evolusioner dari waktu ke waktu. Demokrasi sebenarnya memiliki roh yang sama yaitu kebebasan atau liberalisme (*liberalism*) dalam arti kebebasan individu. Demokrasi Barat berakar dari paham kebebasan individu. Perkembangan suatu paham selalu terkait dengan karakteristik dan perkembangan masyarakat dimana paham itu tumbuh

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 105-106

<sup>16</sup> [http:// www.binustv.com/](http://www.binustv.com/). Selasa, 11 Juni 2013.

dan berkembang. Sebaliknya, arah dan perkembangan masyarakat ditentukan oleh paham yang berkembang di masyarakat tersebut.<sup>17</sup>

Peradaban baru dalam masyarakat Eropa sendiri adalah masyarakat liberal, khususnya tatanan demokrasi dalam kehidupan politik dan sistem kapitalis di bidang ekonomi. Liberasilme merupakan fenomena kebangkitan masyarakat kelas menengah di Eropa, khususnya di Inggris dan Perancis. Pada periode ini masyarakat kelas menengah menunjukkan penentangan mereka terhadap kebijakan konservatif para penguasa di masa itu yang ingin memulihkan tatanan domestik dan regional paska perang Napoleon. Sebaliknya, kaum menengah ini mengartikulasi tuntutan-tuntutan baru terhadap kebijakan penguasa absolut tersebut. Pertama mereka menginginkan pembentukan pemerintah yang efisien dan yang mengakui keutamaan nilai-nilai komersial dan industri. Kedua, mereka menuntut pemerintah berdasarkan perwakilan monarki konstitusional dimana kepentingan-kepentingan mereka terwakili secara langsung. Ketiga, mereka menuntut kebijakan luar negeri yang mengutamakan perdamaian dan perdagangan bebas.

Keempat, kaum kelas menengah menginginkan penyebaran nilai-nilai individualisme dan doktrin-doktrin ekonomi klasik. Dalam masa-masa berikutnya, gerakan untuk mewujudkan tatanan liberal menyebarkan negara-negara lain di Eropa seperti Jerman, Italia, Austria, Polandia dan Spanyol. Gerakan ini makin kuat meskipun terdapat usaha-usaha untuk menghentikannya, misalnya melalui

---

<sup>17</sup> Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta, Kompas, 2010, hlm. 88.

aliansi *Concert of Europe* seperti Inggris, Austria, Prussia, Rusia, dan Perancis. Aliansi Romawi suci (*Holy Roman Empire*) yang diprakarsai oleh Tsar Alexander dari Rusia. Di Perancis terjadi revolusi tahun 1830 oleh kaum kelas menengah dan pendudukan Paris yang memaksa Raja Charles X turun tahta dan digantikan oleh Luis Philippe.

Hal yang sama juga terjadi di Inggris, yaitu gerakan pembaharuan oleh kelas menengah di Birmingham, Glasgow, Manchester, Liverpool dan kota-kota lainnya. Pada akhirnya, Raja William IV menyerah dan diberlakukan *The Reform Bill* pada tahun 1832 yang memperluas hak perwakilan untuk rakyat. Dengan revolusi liberal yang berhasil di kedua negara utama ini, gerakan yang sama di negara-negara Eropa lainnya hanya menunggu giliran saja. Tahun 1848 menandai berakhirnya revolusi liberal di Eropa untuk kemenangan kaum liberal dan ideologi liberalis. Inggris, Perancis dan negara-negara Eropa lainnya memasuki tahap berikutnya dalam proses pembangunan politik mereka, yaitu penguatan negara nasional dan pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip liberalisme.<sup>18</sup>

#### **D. Mohammad Hatta Memandang Demokrasi Barat**

Menurut pandangan Hatta, demokrasi Barat, sangatlah pincang. Apa lagi dengan kritikan Hatta, yang menganggap demokrasi Barat bukanlah demokrasi politik, yaitu demokrasi dalam kehidupam politik, melainkan liberalisme secara umum. Dengan demikian, Hatta mengidentikan demokrasi Barat dengan sesuatu

---

<sup>18</sup> Zulfikri Suleman, *op.cit.*, hlm. 89-91.

yang menimbulkan kekuasaan kapitalisme yang tidak membawa kemerdekaan rakyat, yang dimaksudkannya sebenarnya, paham liberalisme. Karena liberalisme mengandung paham kebebasan individual. Kritik mengenai liberalisme mulai datang dari penganut ideologi lainnya seperti Marx dan para pendukungnya atau dari kaum intelektual liberal sendiri yang senantiasa berfikir tentang perbaikan masyarakat.<sup>19</sup>

Dari sudut inilah Hatta beranjak, ia menolak demokrasi yang bersifat individualisme, karena dalam perkembangan masyarakat di kemudian hari, kaum pemodal yang cepat bisa memanfaatkan demokrasi seperti ini. Kaum pemodal, kapitalis, bisa tumbuh bila tidak ada kekuatan pengimbang terhadap dirinya. Dengan demikian, tumbuh dominan kaum kapitalis dalam demokrasi kapitalis ini. Dalam demokrasi kapitalis inilah terbuka lebar jalan *l'exploitation de l'homme par l'homme*, yakni eksploitasi manusia atas manusia. Manusia buruh dieksploitasi manusia kapitalis. Manusia petani kecil dieksploitasi manusia pemilik tanah, yang lemah dieksploitasi yang kuat.

Dengan itulah Hatta menginginkan demokrasi yang mengoreksi kekurangan dari demokrasi kapitalis. Hak politik harus di tangan rakyat. Supaya rakyatnya bisa mengembangkan hak dan kewajibannya dalam berdemokrasi, secara sadar perlu ditumbuhkan kekuatan pengimbangan guna mencegah dominasi kaum kapitalis dan feodal.<sup>20</sup> Adapun kelemahan-kelemahan dari liberalisme itu

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 141-142.

<sup>20</sup> Salman Alfarizi, *Mohammad Hatta Biografi Singkat 1902-1980*. Jogjakarta: Garasi, 2010, hlm. 106-107.

sendiri yang sudah amati dan dipelajari Hatta ada dua hal. Kelemahan pertama yaitu pada masa abad ke 19, yaitu adanya kesenjangan ekonomi dan sosial antara kaum pemodal dan buruh. Lebih dari itu, yang terjadi pada masa itu adalah proses eksploitasi dan penindasan oleh satu golongan masyarakat yang berkuasa atas masyarakat golongan lemah.<sup>21</sup>

Akibat kenegatifan dari penerapan demokrasi di masa itu telah menjadi sarana kritikan Hatta dan telah mendorongnya untuk mengajukan gagasannya mengenai demokrasi untuk Indonesia. Kelemahan yang kedua adalah demokrasi Barat selalu memiliki sisi politik dan ekonomi, yaitu demokrasi politik dan sistem kapitalisme. Secara spesifik yang ingin dikemukakan Hatta mengenai sistem ekonomi kapitalis lahir terlebih dahulu dan sistem demokrasi diciptakan dan diterapkan untuk menjamin keberlangsungan sistem kapitalisme, bukan sebaliknya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Zulfikri Suleman, *op.cit.*, hlm. 152-153

<sup>22</sup> *loc.cit.*, hlm. 143.